

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disetiap negara tentunya ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mengelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya, salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab (Yensi, 2014).

Dalam permendagri Nomor. 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengolaan Keuangan Desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari dengan 31 Desember.

Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan atau organisasi (Harahap, 2010). Laporan keuangan yang bertanggung jawab merupakan media bagi sebuah entitas pemerintahan untuk bertanggung jawabkan kinerja keuangannya. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan dipakai oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan (Kirayanayanti, 2016). laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 laporan yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa: anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, laporan realisasi anggaran (Lestari, 2016).

Laporan keuangan yang berkualitas itu menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dan dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Supaya laporan keuangan keuangan yang dihasilkan tersebut berkualitas maka, data yang dimasukkan tersebut juga harus berkualitas dan dapat memberikan informasi dalam

pengambilan keputusan (Brien, 2015). Jika data yang di *input* tidak berkualitas informasi yang dihasilkan juga tidak akan baik (Thuma, 2010; Rahayu, 2012).

Sejalan dengan itu Orr (1981) menyebutkan bahwa kualitas data adalah ukuran dari tampilan data yang disediakan oleh sistem informasi dengan data yang sama dalam kenyataannya atau data yang sesuai dengan sesungguhnya. Selain kualitas data, Kualitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan seperangkat aplikasi terpadu atau yang dikenal dengan aplikasi keuangan desa yang digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada asas efektif,efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini baru diterapkan pada Kabupaten Tanah Datar, dan pertama diterapkan di Sumatera Barat, Tanah Datar merupakan Kabupaten tercepat menggunakan aplikasi ini. Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini baru disosialisasikan pada bulan Desember 2015 dan resmi 1 Januari 2016 diterapkan Di Tanah Datar. Waupun desa-desa di Kabupaten Tanah Datar sudah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini tetapi masih banyak nagari-nagari yang terlambat menyampaikan hasil laporan keuangannya pada pemerintahan daerah.

Disamping itu dengan berjalannya sistem keuangan desa ini sangat rentan terjadinya kesalahan baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka dari itu perlunya sistem pengendalian intern pemerintah (Muhmudi, 2007; Darmayani, 2014). Pengendalian intern menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Darmayani, 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk dapat memeberikan keyakinan yang memadai tentang pencaian tujuan organisasi yang dilihat dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Dengan disahkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri termasuk pengelolaan keuangan, pembangunan desa demi terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini sejalan dengan Program Pembangunan Nasional yaitu terdapat dalam

RPJM Nasional 2015-2019 yaitu:” Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam rangka NKRI”. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana sebesar kurang lebih Rp 20,776 Triliun untuk 74.093 desa yang tersebar diseluruh Indonesia dan pada Tahun berikutnya akan bertambah menjadi 1 milyar untuk setiap desa, di tahun 2016 jumlah desa bertambah menjadi 74.754 dengan dana desa Rp 46.982.080.000.000. Selain itu pemerintah desa juga mengelola keuangan yang didapat dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer lainnya berupa alokasi dana desa: bagian dari pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi /Kabupaten/Kota. (www.bpkp.go.id/sakd.bpkp).

Selain itu desa juga harus mampu mengelola keuangannya yang berasal dari sumber daya alam yang dimiliki, begitu besar peran yang diterima oleh pemerintah desa. Maka dari itu pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas supaya menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas maka dari itu BPKP bekerjasama dengan Permendagri membuat sebuah aplikasi untuk memudahkan desa dalam membuat laporan keuangannya yaitu sebuah program aplikasi Sistem Keuangan Desa atau yang sering dikenal dengan nama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama terkait dengan variabel yang diambil yaitu kualitas sistem keuangan desa yang mana pada penelitian sebelumnya meneliti tentang Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) yang penelitian dilakukan di SKPD.

Perbedaan yang kedua yaitu lokasi penelitian yang diambil yaitu seluruh desa di kabupaten Tanah Datar. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah berdasarkan survey yang mana Kabupaten Tanah Datar merupakan Kabupaten yang tercepat di Sumatera Barat menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Kualitas Data, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Dengan Kualitas Sistem Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening Pada Nagari Di Kabupaten Tanah Datar”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Kualitas Data berpengaruh terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?
2. Apakah Kualitas Data berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi?
5. Apakah Kualitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Akuntansi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empiris apakah:

1. Kualitas Data berpengaruh terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
2. Kualitas Data berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.
5. Kualitas Sistem Keuangan Desa memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah untuk:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi pemanfaatan Sistem Keuangan Desa,

sehingga dapat bermanfaat dalam mendorong peningkatan kualitas informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya penelitian di Ranah Keuangan Desa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua menjelaskan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teoritis, review penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel serta teknik analisis data

Bab empat menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dan bab lima sebagai bab penutup, yang akan memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan serta memberikan saran-saran bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

